

Komisi D Sidak ke Akbid Kudus

KUDUS - Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus menggelar inspeksi mendadak (sidak) di Akademi Kebidanan (Akbid) Kudus, Senin (10/8).

Ketua Komisi D DPRD Kudus, Mukhasiron mengatakan, sidak digelar untuk menelusuri polemik berkepanjangan yang melanda Akademi Kebidanan (Akbid) Kudus.

Dia mengatakan, polemik yang muncul pada proses alih bina Akbid Pemkab Kudus menjadi Akbid Kudus, setelah dikelola Yayasan Muria Bina Insan Mulia perlu segera dicari solusinya.

“Ada nasib ratusan mahasiswa, dosen, dan karyawan Akbid yang harus diselamatkan. Jika polemik di tubuh Akbid terus berkelanjutan, kami khawatir dampaknya akan terus meluas,” katanya.

Pada sidak yang juga diikuti Wakil Ketua Komisi D Achmad Yusuf Roni

dan Sekretaris Komisi D Mawahib itu, Komisi D menyarankan agar Akbid segera menyelesaikan kewajibannya untuk mengembalikan aset lancar (uang) sebesar Rp 656.210.330 ke kas daerah.

Kas Daerah

Diketahui saat alih bina Akbid pada 4 Maret 2014 terdapat aset lancar yang belum diserahkan sebesar Rp 3.199.439.330. Uang tersebut telah digunakan pengelola Akbid untuk kelancaran proses belajar mengajar, antara lain kegiatan belajar mengajar (KBM), konsumsi mahasiswa yang tinggal di asrama, pemeliharaan gedung.

Total anggaran yang digunakan mencapai Rp 2.543.229.000. Menurut hasil audit BPK yang kemudian ditindaklanjuti Inspektorat Kudus, sisa aktiva lancar sebesar Rp 656.210.330 diminta segera dikembalikan ke kas daerah.

Inspektorat member tenggat waktu 2 X 30 hari. Batas waktu terakhir pengembalian uang tersebut yaitu akhir Agustus.

Direktur Akbid Kudus, Trisno Suwandi mengaku siap mengembalikan uang sebesar Rp 656,2 juta ke kas daerah. Pengembalian uang tersebut kini masih dalam proses. Ia juga membantah adanya transfer dana ke rekening pribadi pada proses alih bina Akbid.

Dia menambahkan, penyerahan aset Akbid yang bersumber dari dana pemerintah dilakukan setelah proses alih bina. Aset yang pengadaannya berasal dari dana masyarakat juga sudah diserahkan ke Pemkab melalui Dinas Kesehatan pada 27 Mei 2015.

“Akbid Kudus kini statusnya sebagai penyewa aset milik daerah. Nilai sewa disepakati sebesar Rp 44 juta dengan durasi selama 22 tahun,” katanya. (H62-45,48)